PEDAGOGI: Jurnal AUD

by Asyari Asyari

Submission date: 01-Oct-2021 11:11AM (UTC+0700)
Submission ID: 1662253268
File name: PEDAGOGI_Jurnal_AUD_UMSurabaya.pdf (260.63K)
Word count: 3309
Character count: 22004

PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini
Volume 7 Nomor 2 Agustus 2021
P-ISSN: 2599-0438; E-ISSN: 2599-042X

KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 3 NEGARA (SINGAPUR, JEPANG, KOREA SELATAN) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR INDONESIA

M. Ridlwan[1], Asy'ari[2], Ratno Abidin[3]

Pascasarjana Pendidikan Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Muhammadiyah Surabaya Surabaya[1],
Pascasarjana Pendidikan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya Surabaya[2]
PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya Surabaya[3]
Email: ridlwan@pps.um-surabaya.ac.id[1], asyari@fkip.um-surabaya.ac.id[2], rantno.abidin@fkip.um-surabaya.ac.id[3]

Abstrak

Tujuan dari penulisa ini adalah untuk mengetahui kebijakan pendidikan sekolah dasar 3 negara (Singapur, Jepang, Korea Selatan) dan implikasinya terhadap pendidikan sekolah dasar indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Ini terjadi dikarenakan jumlah kelahiran di Indonesia yang tidak dapat terkendali. Dari sini perlu terus melakukan upaya untuk mengembangkan kreativitas dengan cara meningkatannya pendidikan. Karena Negara-Negara di dunia berkembang tidak lepas dari proses pendidikannya yang lebih baik. Penulisan yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian dalam bentuk diagnostik. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode doktrinal (normatif), penulisan ini bertujuan untu kmengetahui landasan kebijakan pendidikan. Informasi yang telah telah dikumpulkan diolah dengan cara menelisik hasil kajian pustakan melalui observasi kunjungan ke 3 Negara dan implikasinya kepada pendidikan Indonesia dan kesimpilannya ind ensia harus update terhadap pendidikan internasional sehingga sedikit banyak menjadikan penddikan indonesia dapat di rekonstruksi menjadi pendidikan yang beroreientasi pada kebutuhan masyarakat. Dari pendidikan perbandingan tiga Negara terkait pendidikan dapat dirumuskan bahwa di Asia Timur dan Pasifik, WEF (World Economic Forum) mencatat bahwa Singapura (peringkat 11) menjadi negara yang terbaik disusul dengan Jepang (peringkat 17) dan Korea Selatan (peringkat 27). Ketiganya merupakan negara di Asia Timur yang memiliki komitmen terhadap peningkatan potensi manusia lewat pendidikan. Indonesia peringkat 65 dari 130 negara di dunia.

Kata Kunci: kebijakan publik, kebijakan pendidikan, sekolah dasar

Abstract

The purpose of this paper is to find out the primary school education policies of 3 countries (Singapore, Japan, South Korea) and their implications for Indonesian primary school education. The background for this writing is because Indonesia is one of the countries with the largest population in the world. This happens because the number of births in Indonesia cannot be controlled. From here it is necessary to continue to make efforts to develop creativity by increasing education. Because countries in the developing world can not be separated from the process of better education. The writing carried out by this author is a research in the form of diagnostics. The writing method used is by using the doctrinal method (normative), this writing aims to know the basis of educational policy. The information that has been collected is processed by examining the results of a literature review through observations of visits to 3 countries and their implications for Indonesian education and in conclusion, Indonesia must update international education so that

more or less Indonesian education can be reconstructed into education that is oriented to the needs of the community. From the comparative education of three countries related to education, it can be formulated that in East Asia and the Pacific, the WEF (World Economic Forum) noted that Singapore (ranked 11) was the best country, followed by Japan (ranked 17) and South Korea (ranked 27). All three are countries in East Asia that are committed to increasing human potential through education. Indonesia is ranked 65th out of 130 countries in the world.

Keynote: *public policy, education policy, primary school*

Pendahuluan

Pendidikan memiliki posisi yang strategis untuk mengangkat kualitas, harkat, dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang berharkat dan bermartabat. Pendidikan akan melahirkan orang-orang terdidik yang akan menjadi kekuatan untuk membentuk suatu organisasi besar sebuah negara. Salah satu pilar untuk menopang suatu Negara adalah melaui pendidikan. Pendidikan memegang berperan penting dalam uapaya keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di suatu negara bisa menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa. Ketika kualitas pendidikan di salaha satu negara terjadi degradasi maka berimplikasi pada kehancuran negara. Menurut Putra (2015) Di saat banyak negara di dunia melakukan reformasi pendidikan dengan mengacu pada GERM, hal berbeda terjadi di Finlandia. Negara ini justru menunjukkan sikap resisten terhadap model pendidikan yang berorientasi pada pasar. Artinya bahwa pendidikan saat ini lebih mengedapan kebutuhan masyarakat daripada menjadikan pendidikan yang membosankan.

Indonesia merupakan negara sedang berkembang dan memiliki jumlah penduduk dengan urutan kelima terbesar. Sebagai negara besar, Indonesia menjadi perhatian kalangan internasional baik dari segi kependudukan maupun dari segi ekonomi. Selain itu, perhatian kalangan internasional juga ditujukan pada bidang pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Bukti dari perhatian kalangan internasional ini dapat dilihat dari besarnya bantuan maupun pinjaman yang diberikan kepada Indonesia dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pendidikan di Indonesia. Hal ini menjadi salah upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah indonesia dan menentukan kebijakan yang menyesuikan dengan kebutuhan masyarakat (Herman, 2013).

Bila dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional, menurut Dewi (2016) sebenarnya proses panjang perjalanan sebelum membuat kebijakan publik termasuk masalah pendidikan sudah memperhatikan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik, misalnya para pihak pembuat kebijakan terkait dengan masalah pendidikan harus melihat realitas sosial, kultural dan sebagainya. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh undang-undang Sisdiknas yang tertulis sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) : Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajuan bangsa. Pasal 4 ayat (3) : Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat.

Arah kebijakan pendidikan nasional adalah menitik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan yang berdaya saing. Konteks daya saing dimaknai sebagai kemampuan penyelenggaraan pendidikan yang siap berkompetisi dengan negara-negara lain. Sebagai ukuran untuk itu kecanggihan atau penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjadi salah satu kunci keunggulan suatu bangsa di era globalisasi. Karena disitulah kebijakan pendidikan harus memperhatikan kekurangan sumber daya manusia yang ada, sehingga salah satu cara dilakukan pemerataan pendidikan. Sutrisno & Rusdi (2017) menyatakan bahwa penyadaran terhadap pembangunan pendidikan harus trus melalukan upaya perbaikan mutu pendidikan. Strategi input-oriented menyediakan berbagai fasilitas kepada guru berkaitan dengan pelatihan yang berorientasi menghasilkan outpun yang bermutu sesuai dengan yang dicita-citakan.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas bahwa peran pendidikan sangat dibutuhkan manusia sejak ia lahir hingga akhir hayat *(life-long education)*. Selain itu pendidikan juga memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan suatu bangsa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas dan mandiri. Pemerintah Indonesia sendiri menaruh perhatian yang sangat besar kepada sektor pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan alokasi anggaran pendidikan yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Untuk periode tahun 2013 ini, pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 25% dari total APBN, yaitu sejumlah 345,335 trilyun rupiah, atau mengalami kenaikan dari dari tahun sebelumnya yang sebesar 336,848 trilyun rupiah (Sulistyadi, 2014).

Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dan terarah dari pemerintah, ini berarti pemunculan kebijakan itu harus dilandaskan pada orientasi tujuan yang kuat yang meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan tidak hanya berbentuk undang-undang saja. Persoalan penting yang perlu disorot adalah apakah kebijakan pendidikan bagian kebijakan publik atau kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Permasalahan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan memosisikan pendidikan dalam konteks sektor-sektor publik yang harus dikelola secara serius dan besarnya tingkat urgensi bagi pemerintah di dalam menetapkan prioritas program-program pembangunan pendidikan menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat. Lagi pula internasionalisasi pendidikan menjadi salah satu alternatif menjadikan bangsa indonesia tidak tertinggal dari segi pendidikan.

Indonesia peringkat 65 dari 130 negara di dunia menjadi PR khusus kepada pemerintah indonesia. Bangsa yang majemuk negara yang besar menjadi sangat penting untuk melakukan trobosan baru. Mengaca Singapura dengan peringkat 11 menjadi negara yang terbaik disusul dengan Jepang dengan peringkat

17dan Korea Selatan dengan peringkat 2. Artinya ketiganya merupakan negara di Asia Timur yang memiliki komitmen terhadap peningkatan potensi manusia lewat pendidikan. Sehingga paling tidak indonesia menjadi salah satu negara yang kurang efektif dalam konteks pendidikan. Dalam hal ini yang menjadi salah satu refrensi buat menkaji adalah pendidikan sekolah dasar yang mengaca kepada negara-negara berkembang. Menurut Sekolah dasar yang terdiri dari tiga negera (Singapure, Jepang dan Korea Selatan) menjadi penkajian dalam tulisan ini. Dari 3 negara tersebut dalam menentukan kurikulum sekolah dasar sangat memperhatikan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang diimpelementasikan menyesuaikan dengan bagaimana membentuk karaketer anak. karena dengan anak-anak yang berkarakter ban berkepribadian baik menunjukkan pendidikan yang diselenggarakan dikatakan berhasil.

Metode Penulisan

Data-data yang dipergunakan dalam penyusunan karya tulis ini berasaldari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yangdibahas. Beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah buku pelajaran, jurnal imiah edisi cetak maupun edisi online, dan artikel ilmiah yangbersumber dari internet. Jenis data yang diperoleh variatif, bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Metode penulisan bersifat studi pustaka. Informasi didapatkan dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang diperoleh. Penulisan diupayakan saling terkait antar satu sama lain dan sesuai dengan topik yang dibahas. Data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik kajian. Kemudian dilakukan penyusunan karya tulis berdasarkan data yang telah dipersiapkan secara logis dan sistematis. Teknik analisis data bersifat deskriptif argumentatif. Simpulan didapatkan setelah merujuk kembali pada rumusan masalah, tujuan penulisan, serta pembahasan yang sesuai. Simpulan yang ditarik mempresentasikan pokok bahasan karya tulis, serta didukung dengan saran praktis sebagai rekomendasi selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengkajian

Ketika ditelisik lebih jauh berkaitan dengan pendidikan sekolah dasar menjadi sangat strategis untuk dijadikan diskusi didalam dunia akademisi. Dalam penulisan karya ilmiah ini menekan pada 3 tiga negara yang menjadi pengkajian berkaiatan dengan sekolah dasar. Yang diantaranya adalah sekolah dasar singapur, sekolah dasar Jepang, dan sekolah dasar korea selatan. Maka dari sini ditelisik lebih jauh dari observasi yang di lakukan oleh Dr. M. Ridlwan, M.Pd dalam kunjungannya ke negara tersebut sebagai agenda pertemuan seluruh rektor pergurguruan tingga perwakilan Universitas yang ditunjuk. Universitas Muhammadiyah Surabaya yang salah satu mewakili perguruan tinggi indonesia yang memenuhi undangan tersebut. Sehingga momentum itu dijadikan sebagai bahan diskusi untuk dijadikan refrensi terhadap pendidikan indonesia. Karena internasionalisasi pendidikan indonesia akhir-akhir ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya membangun kompotensi pendidikan yang ada di indonesia.

Kebijakan Sekolah Dasar Negara Singapure

Oleh karena itu pendidikan dasar singapure memiliki tujuan yakni membantu siswa Singapura untuk menemukan bakat mereka sendiri, memanfaatkan talenta tersebut sebaik-baiknya, mewujudkan potensi semaksimal mungkin, dan mengembangkan semangat untuk belajar sepanjang hidup. Ketika siswa lulus, mereka harus menegakkan moral, mengembangkan akar budaya namun memahami dan menghargai perbedaan, bertanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Memberi kebijakan kepada seluruh warganya wajib belajar 10 tahun, Anak berusia 6 tahun harus bersekolah, Orang tua/Wali akan didenda jika anak mereka tidak bersekolah.

Kementrian Pendidikan Singapura mendorong sekolah menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi memungkinkan siswa memahami topik pelajaran dengan lebih jelas dan mudah Guru dapat menggunakan teknologi untuk mengajar secara lebih efisien & efektif. Guru dapat mempersiapkan terlebih dulu tentang apa yang harus mereka ajarkan. Misalnya Siswa Sekolah Dasar Shuqun (sejak tahun 2006) menggunakan teknologi yang sesuai (seperti dataloggers (pencatat data), PDA (*Personal Digital Assistant-computer saku*), tablet PC (tab), mindmaps (peta konsep), podcasting (perekam dan penyimpan data audio atau video), dan portal nirkabel) di jalur belajar eksperiensial untuk melengkapi berbagai bentuk pembelajaran (seperti pengumpulan data, pengumpulan informasi, penciptaan pengetahuan dan representasi) dan membantu murid belajar lebih efektif.

Luaran (*outcome*) Pendidikan yang diselenggarakan di negara singapure bahwa *negara Singapura yakin* Seorang yang berpendidikan adalah orang yang bertanggung jawab pada dirinya, keluarganya, dan temannya. Seorang yang berpendidikan adalah juga seorang yang bertanggung jawab pada masyarakat dan negaranya. Maka dari upaya pendidikan singapure menekankan pada salah satu karakter. Sehingga suaran (outcome) Pendidikan singapure peserta didik mampu membedakan benar dan salah, ampu belajar untuk berbagi dan mendahulukan orang lain, mampu membangun pershabatan dengan orang lain, mempunya rasa ingin tahu tentang hal-hal baru, mampu berpikir dan menyatakan pendapat mereka, percaya diri/bangga dengan karya mereka, mampu menjaga kebiasaan hidup sehat dan mampu mencintai Singapura.

Kebijakan Sekolah Dasar Negara Jepang

Jepang dengan sebutan negara samurai menentukan kebijakan pendidikan Ada sanksi bagi orang tua ketika anaknya tidak disekolahkan. Diatur dalam Undang-Undang wajib belajar dan berpendidikan. Ada unsur paksaan bersekolah untuk menjadi manusia yang berperadaban. Di Jepang wajib belajar 9 tahun. Kemudian Mata Pelajaran Sekolah Dasar di Jepang terdiri dari Huruf/Bahasa Jepang, Ilmu Sosial, Sains, Seni/Musik, Olahraga, Budi pekerti, Ekonomi Rumah Tangga. Artinya pendidikan sekolah dasar yang ditekankan pada penananman karakter dan dan ilmu pengetahuan.

Kebijakan negara jepang wajib sekolah untuk umur 6-12 tahun. Terdapat dari sekolah dasar 99,36% dikelola

pemerintah, hanya 0,65 dikelola swasta sehingga peran pemerintah lebih dominan. Keikutsertaan dalam belajar di Sekolah Dasar 99%. SD sebagai langkah pertama bagi anak masuk dalam lingkungan social. Memberikan anak usia 6-12 tahun pendidikan dasar pertama yang sesuai dengan perkembangan mental dan fisik. Siswa tidak ditahan/dinaikkan kelas jika prestasi belajar tidak bagus dan sebaliknya. Asosiasi orang tua dan guru wajib ada di setiap sekolah.

Kebijakan Sekolah Dasar Korea Selatan

Kebijakan pendidikan korea selatan yakni Wajib belajar sudah dimulai sejak tahun 1950an. Pendidikan di bawah Kementrian Pendidikan di Tingkat Pusat dan Lembaga-lembaga di bawahnya di masing-masing wilayah, Pemerintah Korsel mengalokasikan 19, 7% dari anggaran belanjanya untuk pendidikan dan 86,2% dari anggaran tsb utk sekolah dasar dan menengah, sisanya untuk Pendidikan Tinggi. Artinya manajemen pendidikan di korea selatan terstruktur mengupayakan kepentingan bangsanya tanpa terkecuali.

Negara Korea Selatan gratis dan wajib bagi anak usia mulai 6-12 tahun 98,8% anak Korea Selatan ikut serta di Sekolah Dasar. Tujuannya adalah Memberi kesempatan belajar kepada semua anak usia sekolah dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas kepada masyarakat Meningkatkan pendidikan untuk semua masyarakat dengan mengembangkan system pendidikan tinggi berkelanjutan bagi anggota masyarakat yang sudah bekerja, sejalan dengan system pendidikan tradisional. Dan kurikulumnya terdadapat pelajaran yang diantaranya Pendidikan Mora, Bahasa Korea, Ilmu Sosial, Aritmatika, Sains, Musik, Olah raga, Kerajinan dan Kegiatan Ekstra kurikuler. Dalam proses belajar mengajar terdapat unsur Gaya pembelajaran melalui Ceramah, Kerja kelompok, Penggunaan media audio visual dan Dialog dengan siswa.

Gambar 1. Aktifitas Proses Pembelajaran di Korea Selatan

Pembahasan

Dari analisis pembelajaran 3 Negara dapat ditarik benang merahnya bahwa setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda. peringkatpun terdapat perbedaan karena menyesuaikan dengan potensi dan kemampuan dari masing-masing dalam mengelola pendidikan. Bangsa yang majemuk negara yang besar menjadi sangat penting untuk melakukan trobosan baru. Mengaca Singapura dengan peringkat 11 menjadi negara yang terbaik disusul dengan Jepang dengan peringkat 17 dan Korea Selatan dengan peringkat 2. Artinya ketiganya merupakan negara di Asia Timur yang memiliki komitmen terhadap peningkatan potensi manusia lewat pendidikan kemudian Indonesia peringkat 65 dari 130 negara di dunia.

Maka peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan

dasar di masa depan memerlukan berbagai input pandangan, antara lain: gagasan tentang pendidikan dasar masa depan. Sehubungan dengan pendidikan dasar masa depan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO telah membentuk sebuah Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI (*The International Commision on Education for the Twenty-First Century*), dalam hal ini beberapa tokoh pendidikan menyatakan pembahasannya pada satu pertanyaan pokok dan menyeluruh, yaitu: jenis pendidikan apakah yang diperlukan untuk masyarakat masa depan?. Rekomendasi dan gagasan Komisi tersebut tentang pendidikan masa depan, khususnya pendidikan dasar merupakan salah satu input yang dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia (Prasojo, 2014).

Pendidikan untuk Abad ke 21 menurut Putra (2015) melihat bahwa pendidikan dasar masa depan merupakan sebuah "paspor" untuk hidup. Pendidikan dasar untuk anak dikonsepsikan sebagai pendidikan awal untuk setiap anak (formal atau nonformal) yang pada prinsipnya berlangsung dari dari usia sekitar 3 (tiga) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya berusia 12 sampai 15 tahun. Pendidikan dasar sebagai sebuah "paspor" yang sangat diperlukan individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus menerus belajar. Dengan demikian, pendidikan dasar memberikan sebuah surat jalan yang sangat.

Kesempatan pendidikan bersama dengan teman-teman sebayanya secara khusus pendidikan sekolah dasar. Di Indonesia sendiri dalam pendidikan sekolah Pendidikan pada umumnya merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan manusia sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu cerdas dan berkarakter sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Karena dalam kenyataan dilapangan masih belum sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sekolah dasar karena anak-anak adalah dunianya bermain (Sulistyadi, 2014).

Solichin (2015) peran negara atau pemerintah yang memiliki wewenang menentukan kebijakan dalam bentuk perundang-undangan kebijakan, negara bebas merumuskan dan menjalankan kebijakannya sendiri, termasuk bidang pendidikan. Kebijakan bidang pendidikan yang memenuhi langit harapan masyarakat Indonesia adalah terpenuhinya pendidikan yang unggul bagi seluruh lapisan masyarakat hingga simpul paling bawah. Kebijakan pendidikan bukan tidak mungkin menjadi bagian kebijakan publik dalam arti yang sesungguhnya, yakni melibatkan peran serta rakyat dalam menentukan cita-cita sosial (social ideals) secara kolektif dalam menentukan kebijakan pendidikan di negara mereka sendiri. Internasionalisasi pendidikan menjadi dasar pendidikan dalam terus

berkolaborasi dari setiap negara dalam menentukan otonomi kebijakan masing-masing.

Ketika indonesia mendapat peringkat 65 dari 130 negara di dunia harus terus melakukan trobosan baru terkait kebijakan pendidikan. Sekolah dasar adalah menjadi salah penentu pendidikan karena pendidikan dasar didesain dengan baik disesuikan dengan kebutuhan dan tidak ada diskriminasi antar semua pihak maka sirkulasi pendidikan sesiai dengan tujuannya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi manusia yang berperadaban. Negara yang maju tidak lepas dari rakyatnya yang berpendidikan. Ketika pendidikan tidak ada manipulasi dan saling memahami dan terus berupaya dengan berbagai sumber daya maka pendidikan yang ada khususnya indonesia berjalan sesuai dengan yang di cita-citakan.

Kesimpulan

Indonesia peringkat 65 dari 130 negara di dunia menjadi PR khusus kepada pemerintah indonesia. Bangsa yang majemuk negara yang besar menjadi sangat penting untuk melakukan trobosan baru. Mengaca Singapura dengan peringkat 11 menjadi negara yang terbaik disusul dengan Jepang dengan peringkat 17dan Korea Selatan dengan peringkat 2. Artinya ketiganya merupakan negara di Asia Timur yang memiliki komitmen terhadap peningkatan potensi manusia lewat pendidikan. Sehingga paling tidak indonesia menjadi salah satu negara yang kurang efektif dalam konteks pendidikan. Dalam hal ini yang menjadi salah satu refrensi buat menkaji adalah pendidikan sekolah dasar yang mengaca kepada negara-negara berkembang. Menurut Sekolah dasar yang terdiri dari tiga negera (Singapure, Jepang dan Korea Selatan) menjadi penkajian dalam tulisan ini. Dari 3 negara tersebut dalam menentukan kurikulum sekolah dasar sangat memperhatikan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang diimpelementasikan menyesuaikan dengan bagaimana membentuk karaketer anak. karena dengan anak-anak yang berkarakter ban berkepribadian baik menunjukkan pendidikan yang diselenggarakan dikatakan berhasil.

Daftar Pustaka

Dewi, R. (2016). Kebijakan pendidikan di tinjau dari segi Hukum kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober

Herman, T. (2013). TIMSS dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Matematika di Indonesia. Mimbar Pendidikan. Nomor 2/XXII

Prasojo, L.D. (2014). Finalcial Resoures Sebagai Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal Internasional (Manajemen Pendidikan)

Putra, A.K. 2015. Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1*

Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*. Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN: 1978-306X; 148-178

Sulistyadi, H.K. (2014) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 2, Nomor 1, Januari, ISSN 2303 - 341X

Sutrisno & Rusdi, M. (2017). Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jambi. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, Volume 3, Nomor 1, September

PEDAGOGI: Jurnal AUD

ORIGINALITY REPORT

23%	23%	6%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	3%
2	journal.unipdu.ac.id Internet Source	2%
3	eduarduslebe.blogspot.com Internet Source	2%
4	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
6	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	1%
7	chasaanteter.blogspot.com Internet Source	1%
8	ejurnal.stiekn.ac.id Internet Source	1%
9	ikrima-rahmatika-layyina-vokasi18.web.unair.ac.id Internet Source	1%

10	repository.unair.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universiti Teknologi Malaysia Student Paper	1 %
12	www.depag.go.id Internet Source	1 %
13	ejournal.stkipbudidaya.ac.id Internet Source	1 %
14	doaj.org Internet Source	1 %
15	gpaikotabaru.blogspot.com Internet Source	1 %
16	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	1 %
17	syahna793.blogspot.com Internet Source	1 %
18	repository.upi.edu Internet Source	1 %
19	lib.unnes.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 20 words
Exclude bibliography	On		